



LAPORAN TPAKD

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Triwulan II

Tahun 2026

**LAPORAN TRIWULAN II
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
(TPAKD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

A. TPAKD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Berdasarkan SE OJK No.1/SEOJK.07/2017 dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 500/114/BUP-LK/2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, TPAKD dibentuk untuk mempercepat akses keuangan daerah melalui 4 pilar : Literasi, Inklusi Perlindungan Konsumen dan Penguatan kelembagaan. Kabupaten Lima Puluh Kota dengan potensi UMKM, Pertanian dan BUMD membutuhkan akses keuangan yang merata sampai nagari.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk bertujuan untuk :

1. Meningkatkan indesk Literasi Keuangan Masyarakat.
2. Meningkatkan Indeks Inklusi keuangan masyarakat.
3. Memperluas akses produk dan layanan jasa keuangan.
4. Melindungi konsumen dari investasi ilegal dan pinjol ilegal.
5. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
6. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
7. Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

TPAKD Kabupaten Lima Puluh Kota beranggotakan berbagai unsur antara lain adalah Pemerintah Daerah, regulator, lembaga/ instansi yang terkait di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) perbankan maupun non perbankan, asosiasi LJK, dan akademisi.

Dalam rangka upaya mempercepat tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota TPAKD diharapkan mampu memfasilitasi pelaku UMKM dalam mengakses lembaga keuangan untuk kemudahan dalam permodalan.

B. PROGRAM KERJA TPAKD YANG SUDAH BERJALAN

1. Sosialisasi Anti Investasi Ilegal & Pinjol Ilegal

Waktu pelaksanaan tanggal 15 Mei 2026 berlokasi di Nagari Ampalu sasaran 250 orang Perangkat Nagari, PKK dan Karang Taruna. Hasil dari sosialisasi masyarakat lebih paham ciri investasi bodong.

2. Edukasi 1 Rekening 1 Pelajar

Waktu pelaksanaan tanggal 20 April 2026 berlokasi di SMP 2 Harau Taram Kecamatan Harau sasaran Pelajar SMP 2 Harau. Hasil dari edukasi siswa lebih paham tentang keuangan dan sudah punya akses ke layanan perbankan resmi.

3. Sosialisasi “ Wajib Halal Oktober”

Waktu pelaksanaan tanggal 4 Juni 2026 berlokasi di Aula kantor Bupati Lima Puluh Kota sasarannya Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat Halal. Hasil dari sosialisasi tersebut pelaku usaha sudah paham kewajibannya dan menyatakan siap mengurus sertifikat halal.

4. Zakat Community Development

Waktu pelaksanaan tanggal 9 Juli 2026 berlokasi di Ampalu Manggunai Kecamatan Lareh Sago Halaban kelompok Mustahik terdata. Hasil dari zakat community development tersebut fokus pemberdayaan ekonomi melalui pertanian dan UMKM agar bisa mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.

C. KENDALA DAN SOLUSI

1. Kendala :

- Keterbatasan anggaran untuk pelatihan UMKM
- Masih ada masyarakat tergiat pinjol ilegal

2. Solusi :

- Sinergi dengan dana BAZNAS dan Dana desa
- Intensifkan sosialisasi via nagari dan medsos

D. PENUTUP

Program Triwulan II berjalan sesuai rencana untuk Triwulan III akan fokus pada gerakan 1 rekening 1 pelajar dan Edukasi & Inklusi Pasar Modal-Saham.

Sarilamak, Juli 2026

**Sekretariat TPAKD
Kabupaten Lima Puluh
Kota**

Dokumentasi Kegiatan TPAKD Triwulan II Tahun 2026

1. Edukasi 1 Rekening 1 Pelajar



2. Zakat Community Development



3. Sosialisasi “Wajib Halal Oktober”



